

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN SINJAI**

MUHAMMAD IKHSAN

Nomor Stambuk : 10561 04178 11



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh
MUHAMMAD IKHSAN
10561 04178 11

Kepada

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan
Kepariwisata Di Kabupaten Sinjai

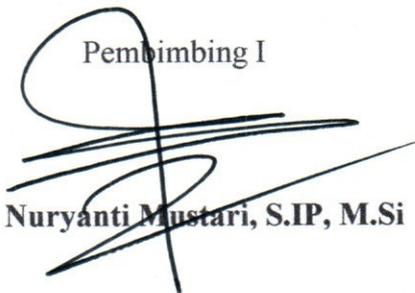
Nama Mahasiswa : Muhammad Ikhsan

Nomor Stambuk : 10561 04178 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

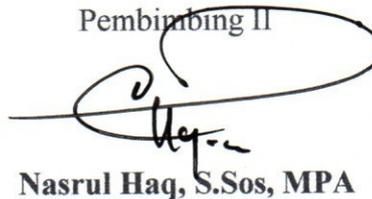
Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

Pembimbing II



Nasrul Haq, S.Sos, MPA

Mengetahui:

Dekan

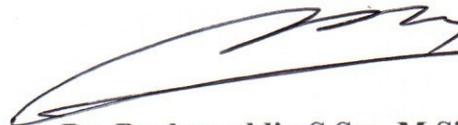
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin S.Sos, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0014/FSP/A.1-VIII/I/38/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa, 09 Januari 2018.

TIM PENILAI

Ketua,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

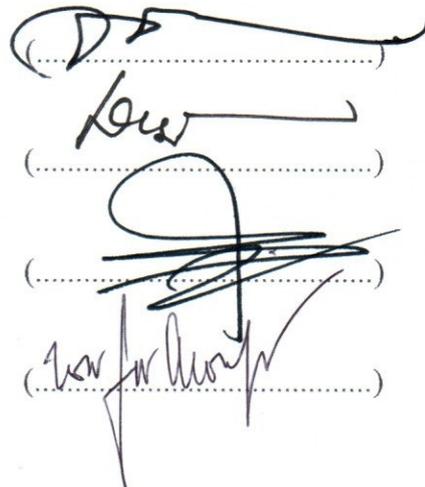
Sekretaris,



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji,

1. Dr. Muhlis Madani, M.Si
2. Dra. Hj. Djuliaty Saleh, M.Si
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si
4. Dr. Anwar Parawangi, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Ikhsan

Nomor Stambuk : 10561 04178 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 12 Desember 2017

Yang menyatakan,

Muhammad Ikhsan

ABSTRAK

MUHAMMAD IKHSAN(2018). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Sinjai (Skripsi dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Nasrul Haq).

Permasalahan penelitian tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di kabupaten sinjai. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pemeliharaan alam dan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat setempat, promosi destinasi pariwisata, pelayanan, dan faktor pendukung keberhasilan pada implementasi kebijakan kepariwisataan di kabupaten sinjai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tipe penelitian ini bersifat fenomenologi yaitu menggambarkan pengalaman yang dilihat oleh informan berkaitan dengan implementasi kebijakan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai belum cukup maksimal dikarenakan dalam upaya pemeliharaan kelestarian alam dan lingkungan hidup yang telah dilakukan masih dibutuhkan peningkatan fasilitas penunjang untuk lebih ditingkatkan lagi. Dan juga pemerintah didalam memberdayakan masyarakat, kurang memberikan hasil yang nampak untuk dinikmati. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemerataan keterlibatan masyarakat sekitar, dan juga kurangnya wisatawan yang memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Selanjutnya promosi destinasi pariwisata telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan objek wisata yang ada, namun perlu ditingkatkan lagi sehingga wisatawan lokal maupun mancanegara terus meningkat. Demikian pula dengan fasilitas-fasilitas umum yang masih kurang tersedia pada objek-objek wisata yang membuat para wisatawan kurang merasakan kenyamanan. Adapun faktor-faktor yang menghambat dan mendukung efektifitas implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai yaitu ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki. Namun kenyataannya kedua faktor tersebut masih kurang ketersediaannya sehingga pelaksanaan kebijakan masih kurang efektif sesuai harapan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pariwisata.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala bentuk pujian penulis lantunkan hanya kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Sinjai “.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Nasrul Haq, S.Sos, M.PA selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH., MH. selaku Penasehat Akademik penulis dari awal perkuliahan hingga akhir studi.
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai beserta jajarannya.
8. Kepada kedua orang tua ku tercinta, atas doa-doa, nasehat, jasa dan pengorbanannya kepada penulis. Penghargaan dan sujud doa semoga Allah SWT. memberikan umur yang diridhoi dan dirahmati, kesehatan yang baik dan selalu dalam lindungan-Nya, dan kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan nasehat selama penulis menempuh pendidikan.
9. Seluruh teman-teman demisioner di BEM FISIP UNISMUH MAKASSAR periode 2015-2016 atas dukungan dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
10. Senior-senior, saudara-saudara seangkatan 04 dan seluruh anggota di MAPALA TOMANURUNG (HIPPMAS) atas segala dukungan, pembelajaran dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam perkuliahan terutama kelas E Angkatan 2011 Ilmu Administrasi Negara yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
12. Buat semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan namanya.

Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan dan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu pada kesempatan ini saran dan kritik sangat diharapkan penulis untuk membangun penulisan ini. Dan semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 12 Desember 2017

Muhammad Ikhsan

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Penerimaan Tim	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Studi Implementasi Kebijakan	7
B. Konsep Pariwisata	13
C. Pengembangan Destinasi	21
D. Kerangka Pikir	23
E. Deskripsi Fokus Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian	27
C. Sumber Data	27
D. Informan Penelitian	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	30
G. Keabsahan Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	32
B. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Sinjai	36
C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Sinjai	52
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi	59

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
RIWAYAT HIDUP	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kunjungan Wisata Tahun 2010-2015	4
Tabel 2. Daftar Informan	28
Tabel 3. Luas Wilayah Kabupaten Sinjai Dirinci Tiap Kecamatan	33
Tabel 4. Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2010-2016	35
Tabel 5. Fasilitas yang tersedia di objek wisata Kabupaten Sinjai	48
Tabel 6. Susunan Pangkaca dan Golongan Pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2017	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Fikir	24
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab I pasal 1 butir 3 dicantumkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pariwisata mencakup 3 (tiga) komponen, yakni wisata, pengusaha objek, dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha lain diluar bidang tersebut namun masih terkait dengan pariwisata. Dalam mengembangkan suatu potensi pariwisata, setiap daerah memiliki upaya dan kebijakan yang harus dilakukan demi terwujudnya tujuan bersama khususnya dibidang pariwisata yang meliputi beberapa aspek seperti aspek ekonomi perdagangan, aspek kebudayaan, aspek lingkungan hidup, dan aspek hukum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan Kabupaten Sinjai Bab II pasal 4 dicantumkan bahwa usaha pariwisata diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra daerah, memupuk rasa cinta tanah air, menjamin adanya kepastian hukum, dan memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa. Selain pariwisata merupakan salah satu pemasukan atau devisa, pariwisata juga membawa nama negara Indonesia hingga terkenal sampai di dunia. Oleh karena itu pemerintah wajib untuk memperhatikan dan menjaga

kelestarian daerah wisata yang ada di daerahnya masing-masing melalui instansi-instansi yang telah dibentuk oleh setiap pemerintah daerah yang ditugaskan untuk menangani permasalahan-permasalahan khususnya dibidang pariwisata. Dalam struktur pemerintahan daerah Sinjai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang pariwisata sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pemerintah Daerah Sinjai memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kepariwisataan, dalam mengelola berbagai potensi yang ada serta mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi. Hal baru pun dalam era globalisasi sekarang ini yaitu kecenderungan yang dihadapi adalah semangat otonomi daerah sebagai konsekuensi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Kecenderungan yang demikian ini memberi peluang bagi pengembangan potensi masing-masing daerah khususnya pemerintah Sinjai dalam memaksimalkan pelaksanaan kebijakan sektor pariwisata yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, interkoneksi antar daerah dan sekaligus dapat menciptakan persaingan antar daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sangat menyadari potensi wisata merupakan penunjang perekonomian, melihat Kabupaten sinjai adalah salah satu kota yang sarat akan nilai budaya dan sejarah yang dianggap memiliki potensi wisata yang tinggi. Dengan menyadari hal tersebut maka melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai bertugas untuk membenahi objek-objek wisata

di Kabupaten Sinjai. Untuk itu dengan adanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, objek-objek wisata dan potensi wisata di Kabupaten Sinjai diharapkan menjadi lebih baik dan lebih layak untuk dikunjungi oleh berbagai wisatawan lokal maupun mancanegara.

Adanya perkembangan di bidang *information and communication technology (ICT)* terkhusus internet yang telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Namun, informasi yang sangat mudah didapatkan membuat persaingan sendiri di dunia pariwisata. Adanya persaingan di dunia pariwisata telah menyebabkan wisatawan lokal jauh lebih memilih berwisata di luar daerah dari pada di dalam daerahnya sendiri. Ini diakibatkan kurangnya informasi tentang wisata yang ada di Kabupaten Sinjai yang tidak kalah menariknya dari daerah lain. Potensi wisata kabupaten sinjai tidak akan berkembang dan diketahui oleh masyarakat luas jika tidak di lakukannya promosi-promosi dengan baik. Untuk itu Kabupaten Sinjai memerlukan adanya promosi dengan strategi komunikasi yang baik agar keberadaannya dapat diketahui oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai telah melaksanakan dan mencoba berbagai program dan usaha untuk mensosialisasikan wisata dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Sinjai agar lebih baik dan lebih maju. Adapun pemerintah Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan para wisatawan dalam lima tahun terakhir sangat signifikan, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel.1 : Data kunjungan wisata Tahun 2010 - 2015

No.	Kategori Wisatawan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Mancanegara	39	37	71	58	255	265
2.	Domestik	10.879	20.326	23.563	27.058	27.327	32.073

Sumber : Bagian pariwisata Dinas Komunikasi Informasi Budaya dan Pariwisata tahun 2014

Dilihat dari data kunjungan wisatawan pada tahun 2010 sampai 2014 bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan yang cukup signifikan begitupun jumlah kunjungan wisatawan lokal. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kecenderungan bagi Kabupaten Sinjai yang dapat mendorong pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah karena memiliki beberapa tempat-tempat pariwisata yang tersebar di beberapa wilayah yang bisa dikembangkan potensinya, diantaranya yaitu wisata alam pantai karampuang, pantai ujung kupang, pantai marannu, pulau larea-rea, air terjun batu barae, air terjun lembang saukang, hutan mangrove, taman purbakala batu pake gojeng, wisata budaya rumah adat karampuang, dan wisata kuliner TPI Lappa. Namun demikian juga terdapat beberapa masalah-masalah yang cukup kompleks, diantara masalah tersebut yang cukup mendasar adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pemerataan pembangunan pada objek-objek wisata dibandingkan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan juga perhatian pemerintah yang hanya terfokus pada pengembangan dua objek wisata saja seperti pada taman purbakala batu pake gojeng dan hutan mangrove. Sehingga hal ini menjadikan

objek wisata lainnya menjadi terabaikan dan diantaranya dalam kondisi sudah tidak terawat dan mengalami kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, berdasarkan visi dan misi pemerintah yang di embang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokoknya, maka disadari bahwa lingkungan eksternal sangat berpengaruh, mengingat setiap aspek yang dilakukan dalam hal pengelolaan objek wisata khususnya di Sinjai diperlukan peran serta dari pihak-pihak lain sehingga keterlibatan tersebut diharapkan dapat mendorong keberhasilan dari pelaksanaan-pelaksanaan kebijakan pemerintah Sinjai khususnya pada bidang kepariwisataan. Karena itu, untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan sektor pariwisata, penulis tertarik untuk mengambil judul “ Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Sinjai.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang harus dikaji dan dijawab adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai ?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung efektifitas implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung efektifitas implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan dari segi keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan dalam bidang pengelolaan sektor pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

2. Manfaat dari segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi pariwisata secara umum, dan berguna bagi peneliti dalam menambah wawasan dalam pemahaman mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten Sinjai.

Peneliti juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menggali potensi dalam implementasi kebijakan disektor pariwisata khususnya di kabupaten Sinjai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Studi Implementasi Kebijakan

Jenkins dalam Parson (2005:463) mengatakan bahwa studi implementasi adalah studi perubahan. Bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa muncul. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik, bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain, apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.

Tachjan (2008:24) secara etimologis menjelaskan implementasi dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan (*implementation*) terkait dengan siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, apa yang mereka kerjakan dan apa dampak dari isi kebijakan. Pada tahapan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada proses untuk melaksanakan kebijakan telah dibuat agar tujuan dapat tercapai. Pada tahap ini diperlukan dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan sering ada

mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.

Untuk dapat mendalami proses implementasi maka perlu dipahami konsep implementasi terlebih dahulu. Penggunaan istilah implementasi mulai muncul ke permukaan beberapa dekade yang lalu. Yang pertama menggunakan istilah tersebut adalah Laswell dalam Purwanto (2012:17). Sebagai ilmuwan yang pertama kali mengembangkan studi tentang kebijakan publik, Laswell mengagas suatu pendekatan yang ia sebut sebagai pendekatan proses. Menurutnya, agar ilmuwan dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang apa sesungguhnya kebijakan publik, maka kebijakan publik tersebut harus diurai menjadi beberapa bagian sebagai tahapan-tahapan, yaitu: agenda setting, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi, dan terminasi. Dari siklus kebijakan tersebut terlihat secara jelas bahwa implementasi hanyalah bagian atau salah satu tahap dari proses besar bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan.

Konteks implementasi demikian baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal itulah yang menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perumusan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Oleh karena itu menurut Jones dalam Mustari (2013:128) “tidak berlebihan jika dikatakan implementasi adalah merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses lahirnya kebijakan.”

Namun kebanyakan dari kita seringkali beranggapan bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pihak pembuat kebijakan tersebut. Padahal menurut Putra dalam Mustari (2013:129): “Sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan negara yang bersifat *self executing*, yang paling banyak adalah yang bersifat *non self executing*, artinya kebijakan negara perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak seperti yang diharapkan.”

Salah satu pakar politik Richard Rose dalam Faried (2012:13) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta kosekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada suatu keputusan tersendiri.” Definisi ini sebenarnya bersifat ambigu, namun definisi ini berguna karena kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Wibawa (1994:15) implementasi kebijakan selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi

dan proyek komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi.

Pandangan lain mengenai implemetasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore dalam Sunggono (1997:139), didefinisikan sebagai “keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”. Mengenai hal ini Wahab (1997:59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji dalam Wahab (2002:59) dengan tegas mengatakan bahwa *the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jacket unless they are implemted* (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Implemtasi kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Dunn dalam Mustari (2013:127) menyatakan bahwa akan

halnya implementasi kebijakan, lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk didalamnya mengeksekusi dan mengarahkan.

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo 2010:87).

Menurut Nugroho dalam Mustari (2009:522) mengemukakan bahwa pada prinsipnya ada empat tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan yaitu :

- a. Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, apakah kebijakan tersebut dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.
- b. Apakah kebijakan tersebut sudah tepat pelaksanaannya. Suatu kebijakan boleh jadi tidak dapat diimplementasikan secara efektif disebabkan pelaksanaannya jelek. Pihak yang menjadi pelaksana adalah pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*) dan aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintah kepada siapa program itu ditujukan yakni kelompok sasaran (*target group*).
- c. Apakah tepat lingkungannya. Ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu lingkungan internal : lingkungan kebijakan adalah interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan, lingkungan eksternal

kebijakan yang terdiri atas *public opinion* akan kebijakan dan implementasi kebijakan.

- d. Apakah dukungan teknis cukup, hal ini terkait dengan ketersediaan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dan keahlian yang diperlukan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan). Selain itu juga adalah kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, karena sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efektif menurut Kadji (2008:41)

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun teori yang digunakan kali ini adalah model implementasi yang dikemukakan oleh Soren C. Winter.

Winter dalam Peters dan Pierre (2003) memperkenalkan model implementasi integratif (Integrated Implementation Model). Winter berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan,

proses implementasi kebijakan, dan dampak/hasil implementasi kebijakan itu sendiri.

Selanjutnya Winter mengemukakan 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni :

1. Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah : komitmen dan koordinasi antar organisasi.
2. Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kerja, dan norma-norma profesional.
3. Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.

B. Konsep Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Istilah kepariwisataan berasal dari akar kata wisata. Dalam kepustakaan tentang kepariwisataan di Indonesia, seperti halnya yang tercantum dalam UU No.10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan: konstruksi pengertian tentang wisata diberikan batasan sebagai : kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Secara lebih luas didalam UU.No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, juga dijelaskan mengenai pengertian kepariwisataan, yang diberikan batasan pengertian atau definisi sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Fleuler dalam Pendit (2002:34) merumuskan pengertian pariwisata dalam arti modern yaitu merupakan dari zaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dari pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan rasa cinta terhadap keindahan alam dan khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil dari pada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan, serta penyempurnaan dari pada alat-alat pengangkutan. Sedangkan Menurut Spillane dalam Bagus (2016:24) pariwisata adalah suatu jasa dan pelayanan.

Profesor hunziker dan Prof. Kraff dalam Spillane (1991:22) pariwisata adalah *“tourism is the total relationship and phenomena linked with the stay of a foreigner at a locality, provided that they do not settle there to exercise a major, permanent or temporary remunerated activity.”*

Menurut Yoeti dalam Bagus (2016:23) syarat suatu perjalanan disebut sebagai perjalanan pariwisata apabila : 1. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat

ke tempat yang lain diluar tempat kediaman orang tersebut biasa tinggal 2. Tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang, dan tidak mencari nafkah ditempat atau negara yang dikunjungi 3. semata-mata sebagai konsumen ditempat yang dikunjungi.

2. Mandat UU No.10/2009 Tentang Kepariwisataaan

Semenjak diundangkannya Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, maka pada prinsipnya keseluruhan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia harus mendasarkan diri pada prinsip dan kaidah yang terdapat pada Undang-Undang Kepariwisataaan tersebut beserta segenap peraturan perundangan pelaksanaanya.

Ada suatu prinsip penting tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia yang telah diamanahkan oleh UU No.10 Thn.2009, yaitu bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan pada asas : manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan , kemandirian, kelestarian, dan kesatuan, yang kesemuanya diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Mandat yang sangat penting yang ditetapkan dalam UU No.10 Tahun 2009, terutama terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia adalah diberikannya kewenangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.

3. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kabupaten Sinjai, diatur bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan.
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal.
- c. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- d. Memberdayakan masyarakat setempat.
- e. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan kesetaraan, dan proporsionalitas.
- f. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.
- g. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.
- h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kewenangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kabupaten Sinjai, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan yaitu :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan.
- b. Menetapkan destinasi pariwisata.
- c. Menetapkan daya tarik wisata.
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata.
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan diwilayahnya.
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya.
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan.
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya.
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata.
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan, dan
- l. Memelihara asset daerah.

5. Tata Kelola Kepariwisata

Kesemua arah kemungkinan terjadinya dampak positif maupun negatif pada dasarnya akan sangat tergantung pada manajemen dan tata pengelolaan kepariwisataan yang diperankan oleh segenap pemangku kepentingan (*stake holders*) baik dari unsur pemerintah-industri-masyarakat yang ada.

Lebih jauh secara teoritik dapat dikemukakan bahwa pencapaian tujuan dan misi pembangunan kepariwisataan berlanjut dan berwawasan lingkungan, hanya akan dapat terlaksanamanakala dalam proses pencapaiannya dapat dilakukan

melalui prinsip tata kelola kepariwisataan yang baik (*good tourism governance/GTG*).

Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik ini pada intinya adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta/industri pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait.

Secara teoritis pola manajemen dari penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan akan dapat dengan mudah dikenali melalui berbagai ciri penyelenggaraannya yang berbasis pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat Terkait

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.

2. Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam pembangunan kepariwisataan meliputi kelompok dan institusi LSM, kelompok sukarela, pemerintah daerah, asosiasi industri wisata, asosiasi

bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.

3. Kemitraan Kepemilikan Lokal

Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Usaha fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, cinderamata, transportasi wisata, dsb. Seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat setempat melalui model kemitraan yang sinergis.

4. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Pembangunan kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya yang dibutuhkan secara berlanjut, yang artinya kegiatan-kegiatan harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan.

5. Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat diwujudkan dengan baik.

6. Daya Dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan kepariwisataan yang harus dipertimbangkan dan dijadikan pertimbangan utama dalam menengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik, biotik, sosial-ekonomi, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada.

7. Monitoring dan Evaluasi Program

Kegiatan monitor dan evaluasi dalam program pembangunan kepariwisataan yang berlanjut mencakup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan.

8. Akuntabilitas Lingkungan

Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat setempat yang tercermin dengan jelas dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan yang ada.

9. Pelatihan Pada Masyarakat Terkait

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis.

10. Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter dan identitas budaya masyarakat setempat secara baik.

Dalam penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik, yang dibutuhkan dari sektor publik adalah adanya perubahan baik dalam cara berfikir maupun tindakan, terutama dengan meninggalkan paradigma lama yang berupa

suatu bangunan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik dan berwawasan lokus tunggal yang berupa birokrasi pemerintahan untuk menuju kepada paradigma baru yang berupa model penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik dan berlokus jamak.

C. Pengembangan Destinasi

1. Lingkup Pengembangan Destinasi

Dalam rangka mengembangkan sebuah destinasi pariwisata, perencana paling tidak harus memperhatikan dua lingkup pengembangan yang saling melengkapi, yaitu lingkup pengembangan spasial dan tingkatan pengembangan dari destinasi tersebut. Yang dimaksud dengan memperhatikan lingkup pengembangan spasial dalam pengertian ini adalah keharusan perencana pengembangan destinasi untuk memahami dan memperhatikan latar belakang kontekstual atau lingkungan makro dari destinasi yang akan dikembangkan tersebut. Perhatian pada lingkungan makro tersebut menjadi sangat penting, hal ini disebabkan keseluruhan strategi pengembangan sebuah destinasi pada intinya tidak boleh terlepas dari kesesuaiannya dengan konfigurasi lingkungan makronya.

2. Komponen Perencanaan Destinasi

Menurut Carter dan Fabricius (UNWTO, 2007), berbagai elemen dasar yang harus diperhatikan dalam perencanaan pengembangan sebuah destinasi pariwisata, paling tidak akan mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

a. Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata

Atraksi merupakan daya tarik yang akan melahirkan motivasi dan keinginan bagi wisatawan untuk mengunjungi destinasi tersebut. Berbagai wujud dari atraksi

wisata ini dapat berupa : arsitektur bangunan, karya seni budaya, dan pengalaman tertentu ataupun berbagai bentuk even pertunjukan.

b. Pengembangan Amenitas dan Akomodasi Wisata

Pada hakekatnya amenities adalah merupakan fasilitas dasar seperti : jalan raya, transportasi, akomodasi dan pusat perbelanjaan yang kesemuanya perlu disediakan untuk membuat wisatawan yang berkunjung ke destinasi merasa nyaman dan senang. Lebih luas, amenities juga bisa berarti fasilitas pendukung demi kelancaran kegiatan kepariwisataan serta memberikan kenyamanan kepada wisatawan.

c. Pengembangan Aksesibilitas

Yang dimaksud dengan aksesibilitas wisata dalam hal ini adalah segenap sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai suatu destinasi maupun tujuan wisata terkait. Aksesibilitas tidak hanya menyangkut kemudahan transportasi bagi wisatawan untuk mencapai sebuah tempat wisata atau destinasi tertentu, akan tetapi juga waktu yang dibutuhkan, tanda penunjuk arah menuju lokasi wisata dan perangkat terkait lainnya.

d. Pengembangan Image (Citra Wisata)

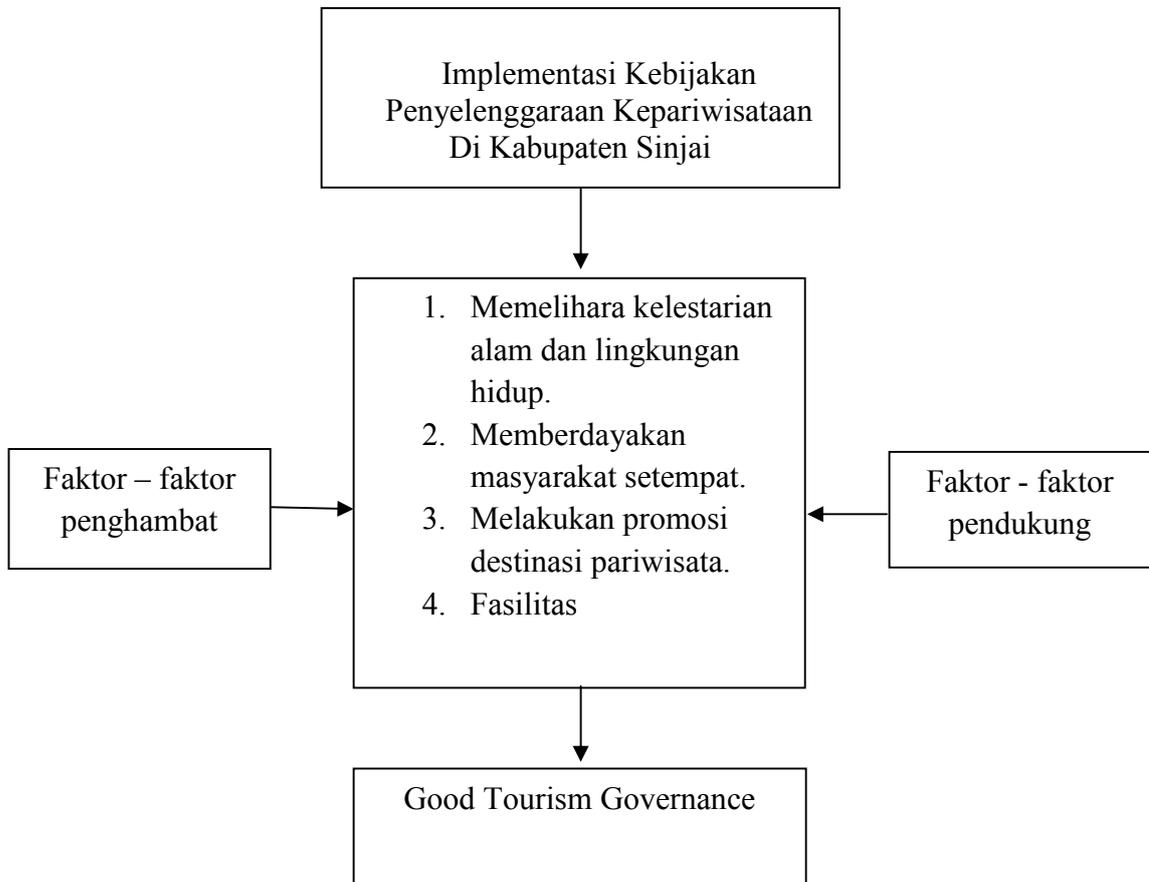
Pencitraan sebuah destinasi merupakan bagian dari *positioning*, yaitu kegiatan untuk membangun citra atau image dibenak pasar (wisatawan) melalui desain terpadu antara aspek : kualitas produk, komunikasi pemasaran, kebijakan harga, dan saluran pemasaran yang tepat dan konsisten dengan citra image yang ingin dibangun serta ekspresi yang tampak dari sebuah produk.

Pada dasarnya *positioning* bertujuan untuk membantu wisatawan dalam rangka mengetahui perbedaan yang sebenarnya antara suatu destinasi dengan destinasi pesaingnya.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan UU.No.10/2009 Tentang kepariwisataan, didalamnya mengatur dan mengarahkan tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia. Mandat yang sangat penting adalah diberikannya kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan sesuai dengan tingkatan kewenangannya. Sejalan dengan hal itu, pemerintah kabupaten sinjai mempunyai peranan sentral dalam pelaksanaan kebijakan diharapkan juga mampu memaksimalkan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

Kabupaten Sinjai memiliki banyak potensi pariwisata yang bisa dikembangkan, sehingga hal ini menjadi peluang besar untuk dijadikan beberapa destinasi objek pariwisata. Untuk itu pemerintah selaku implementor sudah semestinya menjadi ujung tombak pembangunan dan pengembangan terhadap daerahnya sendiri dalam memaksimalkan potensi yang ada dengan melakukan berbagai tata kelola kepariwisataan dengan menggunakan beberapa pendekatan implementasi kebijakan. Dengan begitu, diharapkan adanya perubahan yang berkemajuan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten sinjai.



Gambar 1.

Bagan Kerangka Pikir

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan suatu kebijakan setelah ditetapkannya kebijakan yang dibuat, guna mencapai tujuan dari program kebijakan tersebut.
2. Penyelenggaraan kepariwisataan yaitu rangkaian kegiatan pariwisata yang diadakan dengan adanya destinasi pariwisata guna memenuhi kebutuhan setiap orang.
3. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, dimana yang dimaksud adalah dengan dijadikannya suatu wilayah sebagai destinasi pariwisata, diharapkan mampu memberikan perlindungan dan dampak positif bagi kelestarian alam dan juga lingkungan hidup.
4. Memberdayakan masyarakat setempat, diharapkan mampu memandirikan masyarakat dengan potensi kemampuan yang dimiliki. Sehingga mereka dapat ikut serta dalam pembangunan khususnya pada sektor pariwisata.
5. Melakukan promosi destinasi pariwisata. Hal ini sangat perlu dilakukan oleh suatu daerah yang mempunyai banyak destinasi pariwisata khususnya pemerintah terkait, sebab dengan dilakukannya promosi diharapkan mampu menarik para wisatawan baik lokal maupun mancanegara, sehingga yang diinginkan pun dapat tercapai.
6. Fasilitas yang dimaksud adalah suatu penunjang yang mampu memberikan kepuasan dalam hal ini fasilitas sarana dan prasarana yang ada di objek wisata.
7. Faktor Pendukung yang dimaksud yaitu hal-hal yang menjadi pendorong terlaksananya suatu rangkaian kegiatan.

8. Faktor penghambat adalah keadaan dimana terdapatnya kendala-kendala dalam melaksanakan suatu tujuan yang ingin dicapai.
9. Good Tourism Governance yaitu menyelenggarakan penataan dan pengelolaan objek pariwisata yang baik sehingga mengalami peningkatan dan perubahan positif sesuai apa yang diharapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama dua bulan setelah ujian proposal yaitu dari Maret sampai April 2017.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Adapun pertimbangan dalam pemilihan lokasi karena pemerintah terkait mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Adapun jenis dan tipe penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian yang dilakukan penelitian adalah penelitian kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memodifikasi data-data yang telah dikumpulkan dilapangan berdasarkan fenomena sosial.
2. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian fenomenologi.

C. Sumber Data

1. Data primer (data utama) merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) seperti pemerintah, pengunjung objek wisata dan masyarakat sekitar objek wisata.

2. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, Data sekunder sumbernya adalah melalui literatur-literatur catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Yang berhubungan dengan topik penelitian serta melalui berita di Koran harian, buku dan lain-lain sebagai pendukung kelengkapan data.

D. Informan Penelitian

Penentuan Narasumber (informan) dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu peneliti memilih dengan sengaja orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni pihak-pihak yang terlibat sebagai partisipan dalam implementasi kebijakan publik yakni:

Tabel.2 : Daftar Informan

No.	Informan	Keterangan
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai	1 Orang
2.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai	1 Orang
3.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	1 Orang
4.	Kepala Bidang Kebudayaan	1 Orang
3.	Wisatawan	5 Orang
5.	Masyarakat Sekitar Objek Wisata	2 Orang
Jumlah		11 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan suatu teknik untuk memperoleh data yang dilakukan langsung dengan cara mengamati pelaksanaan pekerjaan yang kemudian dicatat secara sistematis.

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung ke lapangan dengan cara memantau dan mencatat data atau fakta sekaligus ikut serta dalam proses kegiatan tersebut yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Penulis melakukan observasi dengan mengamati langsung ke lapangan, tentang bagaimana implementasi kebijakan pariwisata.

b) Wawancara.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dengan orang-orang yang dinilai berwenang serta ahli dan yang kompeten secara langsung pada bidang pekerjaan yang menjadi topik dalam penyusunan proposal penelitian ini. Wawancara ditujukan kepada orang-orang yang terlibat langsung, diantaranya pemerintah, pengunjung objek wisata dan masyarakat sekitar objek wisata.

2. Studi Literatur

Studi literatur yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku atau sumber-sumber tertulis lainnya yang terkait dengan pokok bahasan yang akan dibuat oleh penulis.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif.

1. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari data field note. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.

2. Sajian Data

Dalam hal peneliti dalam menyajikan data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matrik, gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga label sebagai pendukung narasinya.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang dia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proposi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan tehnik triangulasi. Dimana triangulasi bermakna silang dengan mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi Sumber

Peneliti dalam hal ini melakukan triangulasi sumber dengan cara mencari informasi dari sumber lain atas informasi yang didapatkan dari informan sebelumnya.

2. Triangulasi Metode

Untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti menggunakan triangulasi metode dengan menggunakan tehnik tertentu yang berbeda dengan tehnik yang digunakan sebelumnya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi dengan waktu yaitu untuk menguji krealibitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, dan pada saat sore hari saat narasumber sudah merasa jenuh dan dipenuhi oleh banyak masalah. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Sulawesi Selatan dengan memiliki posisi strategis yang merupakan iklim vegetasi tropis sampai pada posisi strategis pesisir pantai yang membuat Kabupaten Sinjai penuh dengan berbagai panorama alam seperti gunung, pantai dan jajaran beberapa pulau-pulau yang memiliki penghuni dan juga tidak berpenghuni. Adapun secara geografis, wilayah Kabupaten Sinjai terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan apabila dikelola dan dikembangkan, disamping memiliki luas wilayah yang relatif luas. Kabupaten Sinjai secara astronomis terletak 50 2' 56" - 50 21' 16" Lintang Selatan (LS) dan antara 1190 56' 30" - 1200 25' 33" Bujur Timur (BT), yang berada di Pantai Timur Bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Secara administrasi Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, dan sebanyak 80 (delapan puluh) desa/kelurahan. Kabupaten Sinjai terletak arah timur dari Kota Makassar dengan jarak 233 Km dari Kota Makassar, Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Ada pun luas wilayah menurut Kabupaten Sinjai dirinci tiap kecamatan sebagai berikut :

Tabel.3 : Luas Wilayah Menurut Kabupaten Sinjai Dirinci Tiap Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah
			Km2	%	Kel./Desa
1	Sinjai Barat	Manipi	135,53	16,53	9
2	Sinjai Borong	Pasir Putih	66,97	8,17	8
3	Sinjai Selatan	Bikeru	131,99	16,10	11
4	Tellulimpoe	Mannanti	147,30	17,96	11
5	Sinjai Timur	Mangarabombang	71,88	8,77	13
6	Sinjai Tengah	Lappa Data	129,70	15,82	11
7	Sinjai Utara	Balangnipa	29,57	3,61	6
8	Bulupoddo	Bulupoddo	99,47	12,13	7
9	Pulau Sembilan	Kambuno	7,55	0,92	4
Jumlah			819,96	100	80

Sumber: Kab. Sinjai Dalam Angka, Th. 2011

2. Kondisi Umum

Pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra daerah, memupuk rasa cinta tanah air, menjamin adanya kepastian hukum, dan memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan dengan mengutamakan keberpihakan pada masyarakat dan memperkuat

keterkaitan serta saling mendukung antara *stakeholder* terkait yang ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan pengembangan sektor pariwisata dapat lebih efektif dan efisien dengan wawasan berkelanjutan yang dapat menghasilkan output yang berkualitas dan berkomitmen. Sehingga yang diharapkan pun dapat tercapai sebagaimana mestinya.

3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan, dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata :
 1. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem wisata
 2. Seksi Industri Pariwisata
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif
- d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata :
 1. Seksi Promosi Pariwisata
 2. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
 3. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata
- e. Bidang Kebudayaan :
 1. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi

2. Seksi Cagar Budaya dan Museum

3. Seksi Pengembangan Lembaga dan Tenaga Kebudayaan

f. Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi diuraian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan landasan operasional dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilimpahkan dimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2017 mempunyai jumlah pegawai sebanyak 26 orang, yang terdiri dari pegawai pria sebanyak 14 orang dan pegawai wanita sebanyak 12 orang.

4. Data Wisatawan Tahun 2010-2016

Tabel.4 : Data kunjungan wisatawan tahun 2010-2016

No	Kategori Wisatawan	2010		2011		2012		2013		2014	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Mancanegara	34	5	28	7	49	22	49	9	167	88
	Jumlah	39		35		71		58		255	
2.	Domestik	13.451	6.428	15.649	4.677	17.453	611	17.124	9.934	13.848	13.499
	Jumlah	19.879		20.326		18.064		27.058		27.347	

No	Tahun	Jumlah
1.	2015 (Januari-Desember)	32.075
2.	2016 (Januari-Desember)	37.673

Sumber : Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Tahun 2017

B. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Sinjai

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kabupaten Sinjai Bab II pasal 4 dicantumkan bahwa usaha pariwisata diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra daerah, memupuk rasa cinta tanah air, menjamin adanya kepastian hukum, dan memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa. Sebagaimana dengan tujuan penelitian ini yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam proses ini, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus penelitian yakni : 1) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, 2) Memberdayakan masyarakat setempat, 3) Melakukan promosi destinasi pariwisata, 4) Fasilitas.

1. Memelihara Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup

Pariwisata pada umumnya tidak terlepas dari alam dan lingkungan hidup oleh karena keduanya merupakan unsur penting lahirnya sebuah destinasi disuatu daerah. Pemerintah dan masyarakat terutama yang ada di Kabupaten Sinjai mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga dan memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup melalui upaya-upaya yang dilakukan. Sebab dengan terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup, maka akan memberikan nilai keindahan tersendiri dari segi pariwisata. Khususnya dalam hal kebersihan

lingkungan yang terdapat di objek-objek wisata, bagaimana agar pemerintah terkait mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sampah. Sebab sampah merupakan awal permasalahan kecil terjadinya kerusakan lingkungan, untuk itu perlunya perhatian serius oleh pemerintah dalam mengatasinya.

Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai terkait dengan memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Hasil wawancara penulis dengan Plt.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Mengungkapkan bahwa :

“Didalam pelestarian alam, kita berharap untuk tidak merusak menyangkut alam. Dalam hal ini para pengunjung untuk tidak membuang sampahnya sembarangan apalagi ditempat pariwisata.” (Hasil wawancara dengan FDS, 27 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup yang ada diobjek wisata, para pengunjung objek wisata diharapkan tidak membuang sampah disembarang tempat.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran. Mengungkapkan bahwa :

“Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus terang sangat mendukung upaya pelestarian alam karena yang namanya objek wisata itu tidak bisa dipisahkan dengan alam. Contoh objek wisata bakau yang ada di Tongke-Tongke itu kita jaga betul kelestariannya, kerapatannya, karena itu yang akan kita jual kepada wisatawan.” (Hasil wawancara dengan AM, 28 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dengan memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup berarti kita telah menjaga dan melestarikan

objek wisata juga, sebab keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga jika alam dan wisatanya bagus maka ini yang dapat dijual kepada para wisatawan.

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kebudayaan. Mengungkapkan bahwa :

“Semua orang harus peduli dengan lingkungan hidup, khususnya yang ada ditempat pariwisata. Mereka harus peduli dengan kebersihannya agar terlihat bersih dan asri sehingga menarik pengunjung untuk datang.” (Hasil wawancara dengan ZH, 30 Maret 2017)

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa semua orang harus peduli dengan lingkungan hidup yang ada di tempat pariwisata dengan menjaga kebersihannya agar terlihat asri sehingga mampu menarik minat para pengunjung untuk datang.

Dalam memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, tentu ada beberapa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk bisa mencapai hal tersebut.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Plt.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Mengungkapkan bahwa :

“Salah satu upaya yang kami lakukan untuk memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup yaitu menghimbau untuk tidak membuang sampah disembarang tempat khususnya pada objek-objek wisata. Kita juga telah membentuk kelompok sadar wisata untuk bisa menjaga kelestarian objek wisata yang ada.” (Hasil wawancara dengan FDS, 27 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, pemerintah melakukan himbuan untuk tidak membuang sampah disembarang tempat sehingga pencemaran lingkungan pun dapat terhindarkan. Upaya lain pun yang dilakukan yaitu pemerintah membentuk kelompok-kelompok sadar wisata bagi masyarakat sekitar objek wisata untuk menjaga kelestarian lingkungan objek wisata.

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran. Mengungkapkan bahwa :

“Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup itu sangat penting, sebab jika alam dan lingkungan rusak, maka wisatanya pun juga akan rusak. Untuk itu perlu adanya tindakan khusus dalam mengatasinya, salah satunya tentang sampah. Perlu disediakan tempat-tempat sampah dengan pemilahnya seperti sampah botol plastik, sampah basah dan sampah kering”. (Hasil wawancara dengan AM, 28 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, perlu disediakan tempat-tempat sampah dengan pemilahnya seperti sampah botol plastik, sampah basah dan sampah kering. Sehingga sampah-sampah dapat terpilah dengan baik dan tidak berserakan disekitaran lingkungan objek wisata.

Berbeda dengan hasil wawancara diatas, salah seorang dari pihak pengunjung memberikan interpretasi yang lain. Berikut hasil wawancara dengan salah satu pengunjung objek wisata. Mengungkapkan bahwa :

“saya melihat kondisi lingkungan di tempat-tempat wisata sudah cukup bagus, hanya saja masih sering ada sampah-sampah yang berserakan. Ini mungkin karena tempat sampah yang belum memadai disini dan juga belum ada kesadaran pengunjung untuk menjaga kebersihan.” (Hasil wawancara dengan ARF, 30 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa kondisi lingkungan objek wisata telah jauh lebih baik khususnya dalam hal persampahan, hanya saja dibutuhkan pula kesadaran dari setiap pengunjung untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan yang ada pada objek-objek wisata.

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, berikut juga hasil wawancara penulis dengan salah seorang pengunjung. Mengungkapkan bahwa :

“kondisi lingkungan hidup ditempat wisata sinjai kayaknya sudah bagus khususnya disini di hutan mangrove tongke-tongke, cuman masih ada sedikit sampah saya liat. Mungkin karena tempat sampahnya masih minim karena cuman ada di gerbang masuk.” (Hasil wawancara dengan SR, 30 Maret 2017).

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama berada di lapangan dan mencermati hasil wawancara baik dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maupun dari pihak pengunjung objek wisata menunjukkan adanya perbedaan pendapat diantara keduanya. Dari hasil penelusuran penulis, membenarkan adanya upaya-upaya pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup pada objek wisata dengan melakukan himbauan kepada para pengunjung dan juga menyediakan beberapa tempat-tempat sampah pada objek wisata. Namun dari hasil pengamatan penulis bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum cukup efektif dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah. Hal ini dikarenakan himbauan yang dilakukan belum mampu menyadarkan para pengunjung untuk peduli terhadap lingkungan objek wisata dan juga tempat-tempat sampah yang disediakan belum cukup atau belum memadai dibandingkan dengan tingkat pengunjung yang datang di objek wisata tersebut. Serta tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada para pengunjung apabila melakukan pelanggaran perusakan atau pencemaran lingkungan yang ada disekitaran objek wisata.

2. Memberdayakan Masyarakat Setempat

Pariwisata sekarang ini sangat memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari segala aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitaran objek pariwisata. Dengan adanya pariwisata diharapkan mampu membawa pengaruh positif terhadap perubahan taraf hidup masyarakat disekitar objek wisata tersebut. Salah satunya dengan keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan dengan memberikan usaha jasa, membuka usaha-usaha kecil sampai menengah disekitaran objek wisata sehingga mampu menjadi ladang pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Tentu dalam mencapai hal tersebut perlu adanya keterlibatan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai. Sebagaimana dengan majunya industri pariwisata lokal maka taraf hidup masyarakat sekitar pun akan sejahtera dengan meningkatnya pendapatan dari usaha mereka.

Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai terkait dengan memberdayakan masyarakat setempat.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata. Mengungkapkan bahwa :

“Wisata itu memang tujuannya salah satunya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, utamanya masyarakat yang ada disekitaran lokasi wisata. (Hasil wawancara dengan AM, 28 Maret 2017).

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

Mengungkapkan bahwa :

“Pemberdayaan itu sangat mendorong usaha-usaha kecilnya masyarakat dimana hasil-hasil ekonomi produkif bisa diajakan disana, seperti cendra mata dan karya tangan yang bisa dijual sehingga mendorong pendapatan masyarakat dan memberikan peluang usaha dan mengurangi pengangguran.” (Hasil wawancara dengan NJM, 30 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi objek wisata, diharapkan mampu memberikan peningkatan ekonomi serta taraf hidup dengan cara menjual hasil karya tangan dan kreatifitas masyarakat di objek wisata.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kebudayaan.

Mengungkapkan bahwa :

“Kita memang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berencana agar bagaimana bisa masyarakat sekitar bisa meningkatkan ekonominya dengan cara menjual cendra mata, buat warung, dsb. dan kita juga punya program nantinya kedepan untuk itu.” (Hasil wawancara dengan ZH, 30 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pemerintah kedepannya akan membuat suatu program dimana masyarakat sekitar objek wisata bisa membuat cendra mata dan membuka warung agar supaya bisa meningkatkan ekonominya.

Dalam memberdayakan masyarakat setempat, tentu ada beberapa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk bisa mencapai hal tersebut.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata. Mengungkapkan bahwa :

“Kami telah melakukan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat disekitar objek wisata termasuk pengelola objek wisata yang memang dari

masyarakat sekitar, dan ini sudah menjadi kegiatan rutin. karena kami berharap dengan ini bisa mengurangi pengangguran dan itu memang tujuannya.” (Hasil wawancara dengan NJM, 30 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam memberdayakan masyarakat setempat, pemerintah telah melakukan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh masyarakat sekitar objek wisata dan juga pemerintah telah melibatkan masyarakat yang berada disekitar objek wisata untuk berpartisipasi dalam kegiatan kepariwisataan salah satunya yaitu menjadi pengelola objek wisata sehingga mereka mendapat penghasilan dari pekerjaan tambahan dan juga hal ini mampu mengurangi pengangguran.

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran. Mengungkapkan bahwa :

“Upaya pemberdayaan masyarakat setempat pertama yang dilakukan itu melibatkan mereka dengan kegiatan-kegiatan ekonomi di objek wisata, apakah itu membuka cafe, rumah makan, atau pun membuka jasa parkir, jasa toilet, jasa pemandu wisata dsb. Itu kita utamakan untuk masyarakat disekitar dulu karena itu bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Contohnya seperti di wisata hutan mangrove, sudah mulai ada cafe-cafena dan itu usaha-usaha dari masyarakat sekitar.” (Hasil wawancara dengan AM, 28 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam memberdayakan masyarakat setempat, pemerintah melibatkan masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan ekonomi berupa Cafe, Rumah Makan, Jasa Parkir, Jasa Toilet dsb. Sehingga diharapkan dengan hal tersebut mampu memberikan perubahan terhadap taraf hidup masyarakat sekitar objek wisata melalui pendapatan yang terima dari usaha-usaha yang dikembangkan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu pengelola objek wisata.

Mengungkapkan bahwa :

“Betul memang pemerintah telah melibatkan masyarakat dalam mengelola objek wisata contohnya saya. Tapi hasil yang saya dapat tidak sebanding dengan pekerjaan. Misalnya ini karcis masuk, harus habis 100 lembar baru bisa dapat persen sebanyak Rp 15.000 sedangkan 100 lembar ini lama baru habis, apalagi kalo pengunjung jarang datang.” (Hasil Wawancara dengan BHR, 01 April 2017)

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama berada di lapangan dan mencermati hasil wawancara baik dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maupun dari pihak masyarakat setempat selaku pengelola objek wisata, memang pemerintah telah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar. Namun apa yang menjadi tujuan utama sebagaimana harapan bahwa dengan dilakukannya pemberdayaan mampu memberikan atau mengubah taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik masih jauh dari harapan atau belum tercapai. Hal ini dikarenakan penghasilan yang didapatkan belum maksimal dan juga dipengaruhi oleh tingkat pengunjung yang datang ke objek wisata. Sehingga apabila volume pengunjung meningkat maka pendapatan yang didapatkan pun juga akan meningkat begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu dalam upaya tersebut pemerintah belum mampu mengubah dan mensejahterakan masyarakat yang berada disekitar objek wisata dikarenakan pemberdayaan yang dilakukan belum menuai hasil yang maksimal yang mampu memberikan perubahan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Melakukan Promosi Destinasi Pariwisata

Wisatawan didalam melakukan kegiatan wisata tentunya memerlukan informasi wisata terlebih dahulu, khususnya pada tempat-tempat yang akan

menjadi tujuan wisata. Untuk itu diperlukan publikasi atau promosi tentang destinasi pariwisata yang dimiliki oleh suatu daerah guna memberikan informasi akurat kepada wisatawan. Manfaat lain dengan adanya promosi salah satunya yaitu mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi yang diinginkan sehingga hal ini mampu menopang peningkatan pengunjung wisatawan disuatu daerah. Promosi yang dilakukan pun dapat dilakukan melalui berbagai media apalagi di era globalisasi yang serba cepat. Untuk itu dengan dilakukannya promosi diharapkan mampu membawa perubahan signifikan terhadap peningkatan kepariwisataan disuatu daerah.

Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai.

Hasil wawancara penulis dengan Plt.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Mengungkapkan bahwa :

“Promosi destinasi pariwisata itu sangat penting. Sebab hal ini sebagai salah satu penunjang suksesnya kegiatan pariwisata disuatu daerah. Upaya kami dalam melakukan promosi itu sudah berjalan seperti melakukan lomba foto wisata, membuat event kegiatan, brosur, dan masyarakat luas bisa melihat juga disitus *website* kami (Ayo Ke Sinjai).” (Hasil Wawancara dengan FDS, 27 Maret 2017)

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pentingnya promosi pariwisata jika ingin mensukseskan kegiatan kepariwisataan, sehingga untuk dapat mencapai hal tersebut, pemerintah telah berinisiatif untuk melakukan berbagai upaya diantaranya yaitu dengan mengadakan event-event lomba foto wisata, membuat brosur dan juga promosi melalui media internet seperti *website* (Ayo Ke Sinjai).

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kebudayaan. Mengungkapkan bahwa :

“Dalam melakukan promosi kami biasa membagikan *leflet* jika ada kegiatan-kegiatan di Hotel Makassar cuman biasa terbatas yang dibagikan. Selain itu bisa juga dilihat promosinya di *Website*.” (Hasil Wawancara dengan ZH, 30 Maret 2017)

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa promosi destinasi pariwisata telah dilakukan dengan cara membagikan beberapa *leflet* pada saat menghadiri kegiatan-kegiatan besar seperti di hotel-hotel.

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran. Mengungkapkan bahwa :

“ Promosi adalah hal penting, wajib, dan nomor satu yang dilakukan untuk mengembangkan wisata. Upaya yang sudah dilakukan pertama melalui media sosial, branding wisata pada kendaraan, kemudian mencetak paper bag wisata, dan melalui publik figur.” (Hasil wawancara dengan AM, 28 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pemerintah sangat sadar bahwa mempromosikan destinasi wisata itu sangat penting sehingga dalam melakukan promosi destinasi pariwisata, pemerintah telah berupaya melalui berbagai cara yang telah dilakukan, diantaranya yaitu melalui kegiatan lomba-lomba foto wisata atau event pariwisata, melalui media internet seperti website dan media sosial, media cetak seperti brosur, *leflet*, paper bag wisata dan melalui publik figur.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan salah seorang pengunjung. Mengungkapkan bahwa :

“Hal promosi wisata di Sinjai yang saya ketahui itu pernah saya liat di Facebook, selain itu tidak ada.” (Hasil Wawancara dengan ARF, 30 Maret 2017)

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, berikut juga hasil wawancara penulis dengan seorang pengunjung. Mengungkapkan bahwa :

“Promosinya pariwisata Sinjai saya ketahui dari teman-teman yang memposting foto-fotonya di Instagram sama Facebook.” (Hasil Wawancara dengan SW, 30 Maret 2017)

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama berada di lapangan dan mencermati hasil wawancara baik dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maupun dari pihak pengunjung, pemerintah telah menjalankan promosi-promosi destinasi pariwisata dengan bermacam cara seperti promosi melalui media cetak, media internet, event-event kegiatan serta promosi yang dilakukan oleh publik figur. Dari segi promosi pariwisata sendiri telah mengalami kemajuan dan adanya perubahan yang dirasakan. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat luas yang mulai mengetahui destinasi wisata sinjai melalui promosi-promosi yang dilakukan meski belum semuanya. Sehingga hal tersebut juga telah mempengaruhi jumlah pengunjung yang semakin meningkat jika dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya.

4. Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam berbagai usaha kegiatan yang diberikan untuk memenuhi kepuasan seseorang. Salah satu cara untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke lokasi pariwisata adalah dengan memberikan fasilitas yang berkualitas dan bermutu sehingga memberikan kepuasan kepada para pengunjung, dan tentunya memberikan pelayanan yang

diharapkan oleh para pengunjung objek wisata. Bila fasilitas yang mereka nikmati ternyata berada jauh di bawah apa yang mereka harapkan maka para pengunjung wisatawan akan kehilangan minat untuk berkunjung ke tempat wisata. Sebaliknya, jika yang mereka nikmati memenuhi atau melebihi tingkat kepentingan, mereka akan cenderung atau sering berkunjung ke tempat wisata tersebut. Sebab sarana dan prasarana fasilitas objek wisata juga mampu mendukung pelayanan yang diberikan untuk mencapai kepuasan para pengunjung sehingga mereka merasa nyaman dan betah untuk berada di objek wisata tersebut.

Adapun beberapa fasilitas yang tersedia pada objek wisata di Kabupaten Sinjai dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel.5 : Fasilitas yang tersedia di objek wisata Kabupaten Sinjai

No	Objek Wisata	Fasilitas yang Tersedia						
		Mushollah	Gasebo	WC Umum	Kamar Ganti	Tempat Sampah	Tempat Parkir	Penginapan
1.	Taman Batu Pake Gojeng	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada	-
2.	Benteng Balannipa	-	-	-	-	Ada	Ada	-
3.	Kawasan Hutan Mangrove	-	Ada	-	-	Ada	Ada	-
4.	Air Terjun Lembang Saukang	-	Ada	-	-	-	Ada	-
5.	Pantai Ujung Kupang	-	-	-	-	-	-	-
6.	Air Terjun Barambang	-	Ada	-	-	-	Ada	-
7.	Kawasan Rumah Adat Karampuang	-	-	-	-	-	Ada	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa beberapa fasilitas-fasilitas umum yang tersedia di objek-objek wisata yang ada, masih belum cukup maksimal seperti yang diharapkan. Sehingga dibutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan hal tersebut.

Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai.

Hasil wawancara penulis dengan Plt.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Mengungkapkan bahwa :

“Memang untuk meningkatkan pelayanan bagi para pengunjung objek wisata sebaiknya harus ada fasilitas-fasilitas yang tersedia. Namun sarana dan fasilitas memang masih terbatas di objek-objek wisata, seperti belum adanya Musholla, tempat ganti pakaian dan WC umum, itu yang paling pokok.” (Hasil Wawancara dengan FDS, 27 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa, pemerintah sadar akan kurangnya fasilitas yang disediakan di tempat-tempat objek wisata, diantaranya yang paling pokok adalah seperti belum adanya Musholla, tempat ganti pakaian dan WC umum.

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

Mengungkapkan bahwa :

“Sarana dan Prasarana yang ada di tempat pariwisata kita itu sebenarnya masih minim. Padahal itu yang mampu membuat pengunjung merasa puas secara batin sebelum puas dari matanya.” (Hasil Wawancara dengan NJM, 30 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa, sarana dan prasarana yang ada memang masih terbatas dan masih jauh dari harapan. Sehingga dapat

dikatakan bahwa fasilitas yang ada masih belum mampu memberikan kepuasan bagi para pengunjung objek wisata yang datang.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran. Mengungkapkan bahwa :

“Idealnya pelayanan dalam menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana objek wisata, termasuk akses jalan menuju objek wisata itu yang sebenarnya harus disediakan oleh pemerintah, kemudian sarana dan prasarana dasar yang ada di objek wisata yaitu gasebo, musholla, toilet atau ruang ganti dan area makan minum, itu adalah yang dasar untuk memberikan kepuasan pada masyarakat pengunjung objek wisata. Namun sarana dan prasarana belum cukup ketersediaannya yang ada pada lokasi objek wisata dan masih dibutuhkan pembangunan sarana dan prasarana dasar.” (Hasil wawancara dengan AM, 28 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa, idealnya fasilitas yang diberikan yaitu adanya ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana objek wisata yang memadai termasuk akses jalan yang baik. Sarana dan prasarana dasar untuk memberikan kepuasan pengunjung yaitu meliputi gasebo, musholla, toilet, ruang ganti dan area makan dan minum. Sehingga dengan ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan naik untuk mencapai kepuasan para pengunjung.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan salah seorang pengunjung. Mengungkapkan bahwa :

“kalau di sini di Gojeng fasilitasnya sudah cukup bagus, ada gasebo-gasebonya, sama tempat-tempat duduk. Makanya sudah cukup membuat nyaman bagi pengunjung khusus saya. Tidak tau mi kalau orang lain.” (Hasil wawancara dengan AS, 03 April 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa, fasilitas-fasilitas yang tersedia seperti gasebo dan tempat-tempat duduk sudah mampu memberikan

kenyamanan bagi para pengunjung. Khususnya pada objek wisata Batu Pake Gojeng.

Berikut hasil wawancara penulis dengan salah seorang pengunjung.

Mengungkapkan bahwa :

“Disini air terjunnya bagus karena ada dua, bagus juga pemandangannya. Cuma itu jii banyak sekali sampah berserakan baru tidak ada tempat sampahnya, Wcnya juga tidak ada, masih butuh perawatan ku rasa disini.” (Hasil wawancara dengan AA, 1 April 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa beberapa fasilitas penunjang kebersihan masih sangat kurang untuk tempat sampah dan juga fasilitas berupa Wc umum yang sangat dibutuhkan oleh para pengunjung tidak tersedia.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan salah seorang pengunjung.

Mengungkapkan bahwa :

“Hutan mengrovnya bagus sekali, apalagi barusan juga saya liat karena tidak ada di Enrekang. Cuma kalau mau dilihat fasilitasnya masih kurang sekali. Tidak ada Wcnya, parkirannya juga tadi rebutan, tempat sampahnya juga tidak ada kayaknya, pokoknya masih banyak kurang.” (Hasil wawancara dengan SW, 30 Maret 2017).

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama berada di lapangan dan mencermati hasil wawancara baik dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai maupun dari pihak pengunjung, bahwa dalam memberikan pelayanan untuk mencapai kepuasan bagi para pengunjung objek wisata perlu adanya ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu pemerintah terkait sadar untuk pentingnya pengadaan dan pengembangan yang lebih, dalam hal menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pada objek-objek wisata yang ada. Hal-hal dasar yang perlu disediakan untuk menunjang pelayanan bagi para pengunjung yaitu tersedianya gasebo, musholla, toilet atau ruang ganti

dan area makan minum, dengan tercapainya hal dasar tersebut diharapkan lebih mampu memberikan kepuasan pelayanan bagi para pengunjung objek wisata yang datang berkunjung.

C. Fakto-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Sinjai

Pada hakekatnya kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparat pemerintah yang berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk memberikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat, dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

Demikian halnya dengan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan, kebijakan ini merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2013 yang mengatur tentang pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan pada sektor pariwisata sehingga memberikan dampak yang berkemajuan bagi Kabupaten Sinjai khususnya pada sektor pariwisata.

Banyaknya destinasi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Sinjai memberikan peluang besar untuk memajukan pembangunan pada sektor pariwisata. Sehingga dengan pengelolaan yang dilakukan dengan baik dan benar diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat didalamnya.

Untuk mendukung kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Usaha Penyelenggaraan Kepariwisata, dimana yang

didalam fokus penelitian ini ditujukan kepada pemerintah dan masyarakat yang terlibat, maka dibutuhkan beberapa hal yang diharapkan mampu menunjang suksesnya penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai.

Berikut interpretasi penulis terkait dengan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Sinjai.

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu aspek yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan yaitu sumber daya manusia, dalam hal ini pemahaman atau pengetahuan serta keterampilan dalam menjalankan segala hal tentang bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan dijalankan agar apa yang telah dirumuskan dan ditetapkan bisa mampu direalisasikan dengan sebagaimana mestinya, dalam hal ini mencakup penyelenggaraan konsep-konsep kepariwisataan. Sebagai pelaksana suatu kebijakan pemerintah, para pegawai diharapkan mampu memaknai penyelenggaraan kepariwisataan yang layak seperti apa yang diharapkan. Namun tidak hanya itu, masyarakat luas pun yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan diharapkan mampu berpartisipasi aktif untuk bersaing secara positif dan memahami segala hal dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan, sehingga keterlibatan semua pihak diharapkan mampu menopang suksesnya penyelenggaraan kepariwisataan.

Ada pun susunan pangkat, golongan dan jenjang pendidikan terakhir pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai berikut :

Tabel. 6 : Susunan Pangkat dan Golongan Pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2017

NO.	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN
1.	FIRDAUS, S.Sos	Pembina - IV / a
2.	Dra. ZAKIYAH	Pembina - IV / a
3.	NAJAMUDDIN NUR, SE	Pembina - IV / a
4.	ANDI MANDASINI, S.IP, M.SE	Pembina - IV / a
5.	ABD. RASYID, S.Sos	Penata Tk. I - III / d
6.	Drs. H. MUH. TAHIR	Penata - III / c
7.	HJ.INARIYANI A. GANI S.SOS, MM	Penata Tk. I / III d
8.	RACHMAHYANTI SYAM SE,M.SI	Penata Tk.I - III / d
9.	ASNANI KRIDAWANTI HALIM, S.Sos, M.Adm.SDA	Penata - III /c
10.	ROSMAWATI	Penata - III /c
11.	ILHAM, ST	Penata - III /c
12.	ANDI JUMIARTI NUR AMRAM,S,sos	Penata -III / c
13.	MAPPANGARA, ST	Penata -III / c
14.	MUSTIKA WATI, S.Sos	Penata -III / c
15.	INA MAZRIYANA, S.S.T.Par	Penata Muda TK. I - III / b
16.	A. BASO INRASAT	Penata Muda Tk. I - III / b
17.	ANDI YUVITA, S. Sos	Penata Muda TK. I - III / b
18.	FACHRULLAH, S.S.T.Par	Penata Muda Tk. I - III / b
19.	ARHAM PASRAH, S.S.T.Par	Penata Muda Tk.I - III / b
20.	MAIMUNAH, S.S.T.Par	Penata Muda Tk.I - III / b
21.	NUR SYAMSU, S.Sos	Penata Muda - III /a

22.	THAHIR MAKUN, S.IP	Penata Muda - III / a
23.	ANDI ARMAN AMIR, A.Md.Par	Pengatur Muda Tk.I - II / d
24.	MUHAJIRIN	Pengatur Muda Tk. I - II / b
25.	HAMSA	Pengatur Muda Tk I- II / b
26.	HARDIANTI HASYIM, SS	CPNS - III / a

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hanya terdapat 5 (lima) orang pegawai yang memiliki jenjang pendidikan terakhir dari alumni pariwisata. Sehingga hal ini tentunya menentukan bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan didalam melaksanakan segala kegiatan-kegiatan kepariwisataan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kebudayaan, mengungkapkan bahwa :

“seperti yang kita ketahui di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, masih sangat kurang sarjana pariwisatanya. Mungkin karena jurusan ini kurang menjanjikan makanya kurang yang pilih.” (Hasil wawancara dengan ZH, 30 Maret 2017)

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, mengungkapkan bahwa :

“Sumber daya manusia yang masih minim dalam memahami pentingnya pariwisata. Salah satu contohnya adalah masyarakat setempat harus membuat para pengunjung merasa nyaman ketika datang dengan menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kedepannya kami akan melakukan semacam BIMTEK (Bimbingan teknis) kepariwisataan.” (Hasil wawancara dengan FDS, 27 Maret 2017)

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, mengungkapkan bahwa :

“SDM mereka yaitu mengenai cara mereka melayani wisatawan terkait dengan teknik-teknik melayani wisatawan itu nanti kita Insya Allah programkan semacam pengembangan kepribadian atau membuat semacam pelatihan bagaimana melayani wisatawan, bagaimana berbicara dengan wisatawan, bagaimana memandu wisatawan.” (Hasil wawancara dengan AM, 28 Maret 2017)

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, mengungkapkan bahwa :

“Masih rendahnya pendidikan masyarakat yang masih kita tinjau. Dan setelah kita beri pemahaman, mereka sadar bahwa wisata itu memang perlu karena mampu memberikan pekerjaan yang sungguh luar biasa.” (Hasil wawancara dengan NJM, 30 Maret 2017)

Setelah melihat dari beberapa pernyataan di atas, baik yang diungkapkan oleh pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, penulis berkesimpulan bahwa sumber daya manusia masyarakat dalam hal pemahaman pentingnya pariwisata masih sangat minim, sehingga kurang memberikan perhatian khusus dalam melakukan kegiatan-kegiatan kepariwisataan disisi lain juga sumber daya manusia aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih sangat kurang dalam hal disiplin ilmu dalam bidang pariwisata, padahal hal ini salah satu penopang besar dalam mengeluarkan konsep-konsep kepariwisataan yang bersifat membangun yang mampu menunjang kesuksesan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai.

2. Anggaran

Aspek selanjutnya yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan yaitu anggaran atau dana. Anggaran adalah salah satu faktor utama terealisasinya isi-isi dari rumusan kebijakan yang telah dibuat. Dengan anggaran yang sedikit maka semua biaya operasional

yang akan dilakukan bisa saja menjadi terkendala, sehingga apa yang telah direncanakan dapat terhambat.

Dalam sektor pariwisata khususnya dalam hal pembangunan dan pengembangan. Semua yang telah direncanakan atau dirumuskan dalam hal pencapaian tujuan tentunya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran yang didapatkan. Misalkan dalam hal pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur objek wisata, semua itu bisa terlaksana ditentukan oleh anggaran yang dimiliki. Oleh karena itu pemerintah terkait diharapkan mampu memberikan solusi cerdas dalam hal keterbatasan anggaran bila hal tersebut terjadi. Sehingga apa yang telah menjadi target didalam memajukan sektor pariwisata dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Berikut gambaran perencanaan prioritas anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel.6 : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kab.Sinjai

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
	Tahun							
	2014	2015	2016	2017	2018			
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA								
Program Pengembangan Keragaman Budaya	28,363,000	28,363,000	50,000,000	70,000,000	90,000,000	266,726,000		
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	36,600,000	74,236,000	80,000,000	100,000,000	120,000,000	410,836,000		
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	18,920,000	61,105,000	70,000,000	80,000,000	140,000,000	370,025,000		

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 Pemerintah Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menganggarkan beberapa kegiatan-kegiatan prioritas tiap tahunnya yang akan mengembangkan dan memajukan sektor kepariwisataan di Kabupaten Sinjai. Namun didalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan tidak terlaksanakan diakibatkan oleh anggaran yang tidak cair sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya terbengkala. Sehingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan sektor swasta dalam hal memajukan pariwisata Kabupaten Sinjai.

Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai.

Hasil wawancara penulis dengan Plt.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Mengungkapkan bahwa :

“Anggaran yang masih terbatas ini yang menjadi kendala kita, dan juga belum adanya kendaraan operasional. Padahal ada banyak tempat-tempat objek wisata yang bermunculan. Seperti kemarin ada beberapa Kepala Desa datang untuk mau mengembangkan objek wisatanya, saya bilang ; kita mau mengembangkan objek wisata, butuh dana. Kalau tidak ada, mau bagaimana ?.” (Hasil wawancara dengan FDS, 27 Maret 2017)

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa anggaran yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih terbatas. Sehingga pengembangan destinasi pariwisata sangat sulit dilakukan.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, mengungkapkan bahwa :

”keuangan kita masih terbatas sehingga kami bekerja sama dengan pihak swasta dan perbankan dalam hal pemanfaatan dana CSR mereka seperti bekerja sama dengan bank SulSelBar. Namun alhamdulillah kita tahun ini

dapat bantuan DAK sebesar 1,2 M dan kami memfokuskan pengembangan pada pulau larea-rea tanpa mengesampingkan tempat-tempat wisata lainnya.” (Hasil wawancara dengan AM, 28 Maret 2017)

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa kondisi keuangan Dinas Pariwisata masih terbatas. Sehingga pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dan perbankan untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan dana CSR yang dialokasikan ke pengembangan pariwisata.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kebudayaan, mengungkapkan bahwa :

“Iya perlu kita ketahui bahwa semua itu butuh ini, butuh dana. Karena kita tidak bisa berbuat banyak tanpa adanya itu. Namun dalam mengatasi hal tersebut kita melakukan workshop sadar wisata.” (Hasil wawancara dengan ZH, 30 Maret 2017)

Setelah melihat dari beberapa pernyataan di atas yang diungkapkan oleh pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, penulis berkesimpulan bahwa didalam pelaksanaan kebijakan pariwisata di Kota Sinjai masih terkendala pada sektor anggaran. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya anggaran yang didapatkan dari target yang sudah direncanakan, sehingga mempengaruhi proses pengembangan sektor pariwisata. Namun untuk mengatasi hal tersebut pemerintah berinisiatif untuk bekerja sama dengan sektor swasta atau perbankan didalam pemanfaatan dana CSR dan juga melalukan workshop sadar wisata kepada masyarakat setempat agar bisa membantu pemerintah didalam mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Sinjai.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi

Sebagaimana dengan tujuan penelitian yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan

Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Sinjai. Ada pun indikator keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai yakni : 1) Perilaku hubungan antar organisasi (komitmen dan koordinasi antar organisasi), 2) Perilaku implementor tingkat bawah (kontrol politik, kontrol organisasi, etos kerja dan norma-norma profesional), 3) Perilaku kelompok sasaran. Berikut penjelasan dari beberapa indikator diatas.

1. Perilaku Hubungan Antar Organisasi

Didalam sebuah organisasi pemerintahan tentu sepatutnya menjaga perilaku hubungan diantara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Sehingga ada pola kerja sama yang terjalin diantara keduanya guna saling memudahkan dalam proses penyelesaian tugas dan wewenang yang dijalankan terkhusus pada pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai. Adapun indikator variabel perilaku hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu :

a. Komitmen

Komitmen adalah janji atau pendirian seseorang yang diucapkan kepada diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini seorang pegawai telah berkomitmen dalam menjalankan segala visi dan misi organisasi yang diamanahkan kepadanya, sehingga tugas-tugas yang diberikan mampu dikerjakan dan diselesaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kebijakan yang telah disahkan dapat terealisasikan sesuai komitmen yang dibangun.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Plt.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Mengungkapkan bahwa :

“iya kalau komitmen pegawai, saya rasa kita sudah disumpah dan berjanji untuk menjalankan apa yang menjadi wewenang kita. Dan semua pegawai pun demikian, kita semua sudah bersumpah sebelumnya dan itu yang menjadi komitmen bersama pegawai.” (Hasil wawancara dengan FDS, 27 Maret 2017).

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

Mengungkapkan bahwa :

“kita sudah berjanji bahkan disumpah untuk pegawai dinas pariwisata dan kebudayaan untuk siap menjalankan tugas-tugas yang diberikan.” (Hasil wawancara dengan NJM, 30 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam hal komitmen para pegawai, mereka telah berjanji dan bersumpah untuk siap menjalankan semua yang diamanahkan dan hal itu yang menjadi dorongan utama dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran. Mengungkapkan bahwa :

“Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai telah menandatangani fakta integitas, mulai dari pimpinan, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang dan sampai kepada eselon empat. Jadi fakta integritas itu adalah janji untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dinas kepariwisataan dan kebudayaan yang ada didalam dokumen anggaran dinas pariwisata dan kebudayaan.” (Hasil wawancara dengan AM, 28 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pegawai dinas pariwisata dan kebudayaan telah menandatangani sebuah fakta itegritas yaitu janji untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam dokumen anggaran dinas pariwisata dan kebudayaan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kebudayaan.

Mengungkapkan bahwa :

“komitmen kita selaku pegawai dinas pariwisata dan kebudayaan adalah bagaimana agar kita bisa bekerja dan menjalankan apa yang diperintahkan sebaik-baiknya. Kita juga selaku pegawai disini sudah berjanji untuk itu.”
(Hasil wawancara dengan ZH, 30 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pegawai dinas pariwisata dan kebudayaan telah berjanji untuk bisa bekerja dan menjalankan perintah sebaik-baiknya.

b. Koordinasi Antar Organisasi

Kerja sama yang dijalin antar organisasi pemerintahan diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam menjalankan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan kepariwisataan di Kabupate Sinjai, sehingga apa yang telah ditergetkan dapat tercapai.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Plt.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Mengungkapkan bahwa :

“jadi di dinas pariwisata dan kebudayaan kita sudah sering kali berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, seperti dinas lingkungan hidup dan dinas PU terkait akses ke objek-objek wisata. Kita sangat aktif untuk itu.” (Hasil wawancara dengan FDS, 27 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dinas pariwisata dan kebudayaan telah aktif melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam hal untuk pembangunan akses menuju objek-objek wisata.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran. Mengungkapkan bahwa :

“koordinasi internal kita melalui rapat-rapat staf untuk mengevaluasi kinerja yg telah dilakukan selama periode2 tertentu, kemudian apa hambatan

yang ditemui, apa rencana untuk periode selanjutnya seperti itu. Kalau eksternalnya kita juga berkomunikasi dengan stekholder terkait diantaranya adalah kalangan perbankan dan swasta dalam hal pemanfaatan dana CSR mereka, lalu kelompok jurnalis dalam upaya mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Sinjai, dan juga kelompok-kelompok profesi yg juga berhubungan dengan sektor pariwisata, misalnya PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia.” (Hasil wawancara dengan AM, 28 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa koordinasi yang dilakukan ada dua bentuk yaitu secara internal dimana hal ini dilakukan melalui rapat staf untuk mengevaluasi kinerja dan hambatan-hambatan yang ditemukan. Kemudian secara eksternal yaitu dinas pariwisata dan kebudayaan membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti perbankan, swasta, jurnalis, dan kelompok-kelompok profesi yang berhubungan dengan pariwisata.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata. Mengungkapkan bahwa :

“dinas pariwisata dan kebudayaan telah berkoordinasi dengan dinas-dinas lain. Biasanya dengan PU karena akses jalanan menuju objek wisata itu masih belum maksimal pembangunannya, masih butuh dibenahi lebih lanjut. Kita juga berkoordinasi dengan tingkat PemProv dan Kementerian.” (Hasil wawancara dengan NJM, 30 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dinas pariwisata dan kebudayaan telah melakukan koordinasi dengan dinas PU terkait dengan pembangunan akses jalanan menuju objek wisata dan masih sangat dibutuhkan pembangunan berkelanjutan untuk hal tersebut dan juga telah berkoordinasi dengan tingkat PemProv dan Kementerian terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kebudayaan. Mengungkapkan bahwa :

“koordinasi dalam hal ini kerja sama memang harus dilakukan, kita tidak bisa selamanya bekerja sendirian. Makanya dibutuhkan yang namanya koordinasi seperti dengan pihak swasta misalkan. Untuk itu kemarin dinas pariwisata dan kebudayaan sudah menjalin kerja sama dengan Bank SulSelBar untuk bagaimana kedepannya agar pariwisata Sinjai bisa maju.” (Hasil wawancara dengan ZH, 30 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dinas pariwisata dan kebudayaan telah melakukan koordinasi dengan pihak Bank SulSelBar terkait dengan pembangunan sektor pariwisata di Kota Sinjai agar kedepannya kepariwisataan Kabupaten Sinjai bisa maju dan berkembang.

2. Perilaku Implementor Tingkat Bawah

Keterlibatan para pelaksana kebijakan menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan implementasi sebuah kebijakan. Didalam pelaksanaan tersebut lazimnya dibarengi dengan perilaku-perilaku pelaksana tingkat bawah yang mendukung pelaksanaan kebijakan sebagaimana mestinya. Sehingga implementasi kebijakan tersebut bisa berjalan dengan sukses dan sesuai target yang direncanakan khususnya pada implementasi kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai. Adapun indikator variabel perilaku implementor tingkat bawah dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu :

a. Kontrol Politik

Kontrol politik yaitu kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan sekaligus untuk memberi masukan dalam suatu kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini dinas pariwisata dan kebudayaan memiliki fungsi untuk mengawasi dan

menjalankan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Plt.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Mengungkapkan bahwa :

“dinas pariwisata dan kebudayaan tidak terlalu jauh berfokus dalam hal yang seperti itu, apalagi berbicara politik. Kita disini menjalankan apa yang telah ditetapkan dan menjadi wewenang bersama secara profesional.”
(Hasil wawancara dengan FDS, 27 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Sinjai didalam melakukan kontrol politik terhadap kebijakan kepariwisataan dilakukan dengan profesional dan tidak terlalu dalam terlibat dalam unsur politik. Apa yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang menjadi wewenang dinas pariwisata kabupaten sinjai.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran. Mengungkapkan bahwa :

“segala bentuk kebijakan tujuannya pasti baik, khususnya kebijakan kepariwisataan di kabupaten sinjai. Kontrol yang kita lakukan dalam pelaksanaannya memang sesuai dengan yang menjadi tugas kita.(Hasil wawancara dengan AM, 28 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa kontrol politik yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan hanya yang sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan dan kebijakan yang dibuat tentang kepariwisataan di Kabupaten Sinjai telah sesuai dan baik untuk diterapkan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kebudayaan. Mengungkapkan bahwa :

“kontrol yang kita lakukan disini itu seperti melakukan pemantauan sejauh mana telah dilaksanakan, melakukan evaluasi-evaluasi dan masukan-

masukannya bagaimana baiknya untuk kedepan.” (Hasil wawancara dengan ZH, 30 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten sinjai telah melakukan pemantauan tentang pelaksanaan kebijakan dan juga melakukan evaluasi-evaluasi kinerja dan memerikan solusi untuk yang akan dilakukan selanjutnya.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata. Mengungkapkan bahwa :

“apa yang menjadi tugas kita di dinas pariwisata dan kebudayaan didalam melakukan pengawasan, hanya yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan seperti yang telah ditetapkan dan bagaimana mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada.” (Hasil wawancara dengan NJM, 30 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dinas pariwisata dan kebudayaan melakukan pengawasan kebijakan hanya terlibat dengan apa yang akan dikerjakan dan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Diantaranya yaitu mengatasi kekurangan-kekurangan bila ada yang ditemukan.

b. Kontrol Organisasi

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan perlu adanya pengawasan yang dilakukan terkait dengan bagaimana kondisi sebuah struktur instansi yang menjalankannya. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui sejauh mana sebuah kebijakan telah dilaksanakan, sehingga kontrol organisasi ini dilakukan secara internal pada sebuah instansi yang memiliki kewenangan didalam menjalankan sebuah kebijakan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Plt.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Mengungkapkan bahwa :

“pengawasan pegawai kita lakukan dengan cara biasanya dirapat-rapat pegawai yang diadakan setiap tanggal 5 tentang rapat kemajuan kegiatan, evaluasi program dan telah berjalan sesuai dengan program kegiatan.” (Hasil wawancara dengan FDS, 27 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pengawasan pelaksanaan kebijakan dilakukan pada saat rapat-rapat pegawai yang rutin dilaksanakan setiap tanggal 5. Hal ini membahas tentang rapat kemajuan kegiatan, evaluasi program kegiatan dan telah terlaksana seperti yang diharapkan.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran. Mengungkapkan bahwa :

“didalam hal melakukan kontrol kita rutin laksanakan pada saat rapat-rapat pertemuan biasanya juga pada saat upacara. Itu kita lakukan juga untuk mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan.” (Hasil wawancara dengan AM, 28 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa kontrol yang dilakukan untuk mengetahui kinerja yang terlaksana, rutin telah dilakukan pada saat rapat pertemuan para pegawai dinas pariwisata dan kebudayaan dan juga membahas kinerja para pegawai yang telah dikerjakan.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata. Mengungkapkan bahwa :

“pengawasan kita lakukan dalam bentuk pemantauan kinerja-kinerja pegawai selama bertugas dan saling mengontrol bawahan. Dengan begitu kita bisa tahu sejauh mana yang telah dikerjakan pada setiap bidang.” (Hasil wawancara dengan NJM, 30 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa didalam melakukan pengawasan, kepala bidang melakukan pemantauan kepada bawahan tentang bagaimana kemajuan kinerja-kinerja pegawai selama bertugas sehingga setiap kepala bidang dapat mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dilakukan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kebudayaan.

Mengungkapkan bahwa :

“kita disini ada kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala bidang dan kepala bidang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Jadi begitu pengawasannya didalam organisasi, dan pertanggung jawabannya juga biasa saat rapat-rapat kerja.” (Hasil wawancara dengan ZH, 30 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa bentuk kontrol yang dilakukan kepada setiap anggota pada struktur kepegawaian yaitu saling bertanggung jawab kepada atasan secara langsung. Dan segala bentuk pertanggung jawaban atas kinerja yang telah dilakukan pada saat rapat pegawai sekaligus menjadi bahan evaluasi.

c. Etos Kerja

Etos kerja atau semangat kerja sangat menunjang pelaksanaan sebuah kebijakan. Apabila semangat yang dimiliki para pegawai terus dipertahankan dalam bertugas, maka setiap pekerjaan akan dapat terselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. Sehingga hal ini diharapkan dapat terjadi kepada para pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Plt.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Mengungkapkan bahwa :

“kita memberikan petunjuk untuk menjalankan tugasnya masing-masing, dan alhamdulillah didalam hal ini etos kerja semua kepala bidang, kepala seksi dan staf alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan memang saya katakan bahwa kita ini bekerja dalam satu kekuatan, satu gagal maka gagal semua, dan satu berhasil maka berhasil semua. (Hasil wawancara dengan FDS, 27 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa semangat kerja pegawai didalam menjalankan tugas-tugasnya sangat baik. Dan semuanya saling

mendukung dan saling memotivasi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya. Dan juga saling memberikan petunjuk didalam menjalankan tugas masing-masing pegawai.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran. Mengungkapkan bahwa :

“kalau etos kerja alhamdulillah dalam dua bulan ini teman-teman lumayan bersemangat karena pertama kita OPD baru dengan kewenangan yang lebih luas karena sudah menjadi instansi tersendiri kemudian banyak juga orang-orang baru tentunya dengan semangat baru yang terpelihara.” (Hasil wawancara dengan AM, 28 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa etos kerja pegawai cukup bersemangat dalam bertugas hal ini didorong oleh terbentuknya OPD baru yang menjadi instansi tersendiri didalam menangani hal-hal kepariwisataan dan juga oleh karena adanya pegawai-pegawai baru dengan semangat baru yang membuat efektivitas kinerja lebih maju.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata. Mengungkapkan bahwa :

“semangat yang kita miliki sangat luar biasa hal ini dapat dilihat dari upaya yang biasa kita lakukan yaitu terjun langsung ke lokasi melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi dan melakukan pembenahan.”(Hasil wawancara dengan NJM, 30 Maret 2017).

Hasil wawancara dapat dianalisis bahwa semangat yang dimiliki oleh para pegawai didalam melaksanakan tanggung jawab sangat luar biasa, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan langsung pegawai dilapangan untuk melakukan pembenahan.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kebudayaan. Mengungkapkan bahwa :

“kita sangat bersemangat dalam bekerja, karena kita memang sangat serius untuk membenahi pariwisata sinjai. Apalagi baru-baru ini kita telah dapat bantuan dari pusat untuk pengembangan objek wisata.” (Hasil wawancara dengan ZH, 30 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa semangat kerja para pegawai dapat dilihat dari keseriusan mereka didalam melakukan pembenahan pariwisata. Hal ini juga didorong karena telah mendapat bantuan dari pusat untuk pengembangan objek wisata. Sehingga memudahkan pegawai didalam melakukan pembenahan sektor pariwisata.

d. Norma-norma profesional

Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku implementor kebijakan didalam melaksanakan kebijakan tentu ada aturan atau batasan-batasan yang mengatur sesuai bidang profesinya masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan. Sehingga kebijakan yang dilaksanakan pun dapat berjalan efektif dan efisien.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Plt.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Mengungkapkan bahwa :

“setiap bidang dan seksi-seksi yang ada menjalankan fungsinya sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi sudah dibagi dan diatur sedemikian adanya dan itu kita selalu arahkan .“(Hasil wawancara dengan FDS, 27 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa didalam menjalankan kebijakan para pegawai selaku pelaksana telah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang telah ditetapkan sesuai aturannya, dan hal ini dibantu dengan arahan-arahan yang biasa diberikan untuk mempermudah dalam menjalankan tugas.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran. Mengungkapkan bahwa :

“berbicara tentang profesional kerja, BKD telah menempatkan pegawai sesuai dengan pertimbangannya dan secara teknis mereka yang tahu. Namun kita disini menjalankan apa yang telah diatur dan ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing.”(Hasil wawancara dengan AM, 28 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa profesional kerja para pegawai sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan kemampuan mereka pun telah dipertimbangkan oleh BKD pada saat penempatan tugas.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata. Mengungkapkan bahwa :

“iya itu sudah jelas saya rasa, kalau kita memang setiap bidang punya tugas masing-masing disini. Bidang promosi tugasnya jelas, bidang kebudayaan tugasnya juga sudah jelas, begitu pun dengan bidang-bidang yang lain. Sudah ada pembagian tugas dan itu diatur.”(Hasil wawancara dengan NJM, 30 Maret 2017).

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kebudayaan. Mengungkapkan bahwa :

“dalam pembagian kinerja kita telah melaksanakannya sesuai dengan yang ditentukan, cuman terkadang biasanya kalau ada satu agenda kegiatan kita sebisa mungkin bekerja sama saling membantu antar bidang agar lebih mudah. “(Hasil wawancara dengan ZH, 30 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa para pegawai didalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian tugas masing-masing bidang. Dan semua itu sudah diatur setiap bidangnya. Namun terkadang mereka saling membantu antar bidang apabila ada kegiatan yang diselenggarakan.

3. Perilaku Kelompok Sasaran

Kesuksesan pelaksanaan suatu kebijakan salah satunya ditentukan oleh kelompok sasaran. Respon mereka sangat memberikan dampak besar bagi suatu kebijakan apakah suatu kebijakan itu berhasil atau tidak. Sehingga didalam pelaksanaan kebijakan kelompok sasaran ikut serta dengan antusias.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Plt.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Mengungkapkan bahwa :

”saya liat dipengembangan pariwisata ini masyarakat sangat antusias. Di hutan Mangrove saja sudah banyak yang jual-jual, sudah ada tempat parkir, responnya baik.“ (Hasil wawancara dengan FDS, 27 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa didalam menyikapi pelaksanaan kebijakan, kelompok sasaran masyarakat sangat antusias meresponnya dengan baik. Hal ini dapat diliat dari meningkatnya pengunjung daan juga sudah adanya penjual dan juru parkir di objek wisata yang mendorong kemajuan pariwisata di Kabupaten Sinjai.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran. Mengungkapkan bahwa :

“wisatawannya sendiri alhamdulillah sejak dua bulan ini respon mereka positif hal ini diliat dari semangat mereka untuk datang berkunjung di objek-objek wisata yang ada. Kemudian untuk pelaku-pelaku ekonomi disekitar objek, kami memberikan arahan, masukan bagaimana mengelola wisata itu. Alhamdulillah responnya bagus.“(Hasil wawancara dengan AM, 28 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa para kelompok sasaran seperti wisatawan sangat positif merespon pelaksanaan kebijakan pariwisata, dengan dirasakannya adanya pembenahan yang membuat mereka antusias untuk datang berkunjung. Kemudian masyarakat sekitar objek wisata pun demikian,

mereka dengan semangat ikut terlibat sebagai pelaku ekonomi dengan membuka cafe-cafe apung, penyewaan perahu, dan berbagai macam jual-jualan yang tersedia.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata. Mengungkapkan bahwa :

“perilaku mereka baik, sangat merespon apa yang disampaikan oleh kami. Dan mereka mulai sadar tentang pentingnya pariwisata itu sendiri..”(Hasil wawancara dengan NJM, 30 Maret 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa kelompok sasaran sangat mendukung kebijakan pariwisata dan menerimanya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari mulai adanya kesadaran akan pentingnya pariwisata didaerah mereka.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kebudayaan. Mengungkapkan bahwa :

“didalam melaksanakan kebijakan kita perlu adanya kelompok sasaran di objek wisata yang dituju, hal ini untuk mengetahui bagaimana responnya dengan cara melakukan koordinasi kepada mereka. Karena kalau ada kebijakan yang dibuat namun mereka tidak terima kan percuma. Cuman dalam hal ini mereka meresponnya dengan baik, karena kita aktif koordinasi dengan mereka.“(Hasil wawancara dengan ZH, 30 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa yang menjadi kelompok sasaran telah merespon dan melaksanakan dengan baik seperti yang telah disampaikan oleh pegawai melalui koordinasi yang aktif dilakukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai yaitu :
 - a. Dalam upaya pemeliharaan kelestarian alam dan lingkungan hidup yang telah dilakukan, telah memberikan sedikit perubahan yang maju. Namun masih dibutuhkan peningkatan fasilitas penunjang untuk lebih ditingkatkan lagi.
 - b. Pemerintah didalam memberdayakan masyarakat, belum memberikan hasil yang nampak untuk dinikmati. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemerataan keterlibatan masyarakat sekitar, dan juga kurangnya wisatawan yang memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat.
 - c. Promosi destinasi pariwisata telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan objek wisata yang ada, namun perlu ditingkatkan lagi sehingga wisatawan lokal maupun mancanegara terus meningkat.
 - d. Kurangnya fasilitas-fasilitas umum yang tersedia pada objek-objek wisata yang membuat para wisatawan kurang merasakan kenyamanan.
2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung efektifitas implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai yaitu ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki. Namun kenyataannya kedua faktor tersebut masih kurang ketersediaannya sehingga pelaksanaan kebijakan masih belum cukup efektif sesuai harapan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, antara lain sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah membuat sanksi tegas berupa pemberian denda kepada mereka yang melakukan pencemaran lingkungan di objek wisata.
2. Masyarakat sekitar objek wisata dibentuk menjadi suatu komunitas kreatif yang memiliki nilai jual agar bisa dipasarkan ditempat-tempat objek wisata.
3. Lebih meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar untuk bisa membantu pemerintah dalam menunjang fasilitas-fasilitas objek wisata.
4. Hendaknya diadakan studi wisata untuk mengatasi keterbatasan pemahaman dan pengetahuan pada sektor pariwisata.
5. Perlunya pembenahan maksimal objek wisata, sehingga investor pun berminat untuk bekerja sama dalam mengatasi keterbatasan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab,Solichin. (2014), Analisis Kebijakan : *Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Ali, Faried,dkk, (2012). Studi Analisis Kebijakan Konsep, *Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Ardilah Mahrik.(2016). *Strategi Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Sinjai*. Makassar. *Skripsi*
- Dunn.William.N. (2003) Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, UGM Press.
- I Gusti Bagus Rai Utama. 2016), Pengantar Industri Pariwisata : *Tantangan dan Peluang Bisnis Kreatif*, Yogyakarta, Deepublish.
- J. Spillane. James. DR. (1991), Ekonomi Pariwisata : *Sejarah dan Prospeknya*, Kanisius.
- Lenni Hasni Mulyani.(2015). *Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Peningkatan Wisatawan Domestik Di Kota Makassar*. Makassar.*Skripsi*
- Mustari, Nuryanti. (2013), *Implementasi Kebijakan Publik*, Makassar, Membumi Publishing.
- Parsons, Wayne. (2005). Public Policy : *Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta, Kencana.
- Pendit, Nyonya S. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : Pt.Prandy Paramita.
- Peters, B. Guy and Jon Pierre. 2003. Handbook Of Public Administration. SAGE Publications. London.
- Purwanto, Agus dan Sulistiyastuti, Ratih, (2012), *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Gava Media.
- Subarsono, (2005). Analisis Kebijakan Publik : *Konsep, Teori dan Aplikasinya*, Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Sunaryo, Bambang. (2013). Kebijakan Pembangunan, Destinasi Pariwisata : *Konsep Dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta,Gava Media.

- Sunggono, Bambang, 1997. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Tachjan, (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Wahab. (1997). *Analisis Kebijakan*, Jakarta : Bumi Aksara
- Wahab, S, Abdul. (2002). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto, (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi, (2012), *Kebijakan Publik (Teori Proses dan Studi Kasus)*, Yogyakarta, CAPS.
- [www.sinjaikab.go.id/obyek wisata](http://www.sinjaikab.go.id/obyek_wisata)
(diakses tanggal 2 April 2016 pukul 09.26 wita)
- Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan Kabupaten Sinjai.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai.

RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD IKHSAN. Lahir di Manokwari 26 April 1993, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Massalinri dan Darmah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Kamp Ambon Manokwari (Papua Barat) pada tahun 2005. Lalu melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 02 Panaikang

Sinjai Timur dan tamat pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Sinjai Utara dan tamat pada tahun 2011. Setelah itu pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Selama menempuh dunia kemahasiswaan, penulis juga aktif menjadi pengurus di BEM FISIPOL UNISMUH MAKASSAR pada periode 2015-2016 dan menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kader, dan pada periode yang sama diangkat menjadi Sekretaris Umum. Penulis juga aktif diorganisasi kedaerahan MAPALA TOMANURUNG (HIPPMAS) pada periode 2012-sekarang. Dalam menyelesaikan studinya menyusun skripsi, penulis mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiahnya dengan judul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Sinjai”.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Plt.Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Sinjai



Wawancara dengan Kabid Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata



Wawancara dengan Kabid Kebudayaan



Wawancara dengan Kabid Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata



Wawancara dengan pengelola objek wisata Air Terjun Lembang Saukang



Wawancara dengan pengelola objek wisata Air Terjun Barambang



Wawancara dengan pengunjung Wisata Air Terjun Barambang



Wawancara dengan pengunjung Wisata Taman Purba Kala Batu Pake Gojeng



Wawancara dengan pengunjung Wisata Hutan Mangrove